

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Aristoteles, *Politik (La Politica)*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Cetakan Kedua, (Jakarta: Visimedia, 2008)
- Bachsar Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990)
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gramedia, 2002)
- Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Farid Wajdi, Imra, et al., *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- H.A. Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016)
- H.A.S, Natabaya dalam Jimly Assiddique dkk, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi; Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004)
- Hans Kelsen dalam Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020)
- Henry P Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001)
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011)

- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Effendi Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Aditya Bakti, 1994)
- John Rawls, *A Theory of Justice*, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012)
- Kusnardi Moh. Dan Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988)
- Kusnardi Muh. Dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*”, (Jakarta: PT Gramedia, 1983)
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998)
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970)
- Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Stout HD, *de betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004)
- Sulaksono, *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019)

Wilian Chang dalam Bha'iq Roza Rakhmatullah, *Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023)

Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, (Jakarta: Setara Press, 2016)

Journal International/Jurnal Nasional:

Ahmad Basarah “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 19, 2012

Ahmad Fadil Sumadi, “Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung terhadap Pengadilan dibawahnya”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, 2012

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, (Bandung: 2000)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Laporan Tahunan Tahun 2022”, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023)

Bryan A Garner, *Black’s Law Dictionary*, 8th ed. (Minnesota: West Publishing Co, 2004), dalam Muh. Ridha Hakim, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, 2018

DR. Ernawati Munir, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen 1945*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020)

Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, (Jember: Universitas Moch. Sroedji Jember, 2012), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 2, 2013

Firmansyah Arifin dkk., “Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara”, *Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*, Jakarta, 2005

Jimly Asshiddiqie, “Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer”, Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, (Jakarta: KYRI, 2012)

Mochtar Kusumaatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang, Makalah, (Jakarta, 1995)

Mulya Lubis, “Meluruskan kembali Peradilan Indonesia”, Diskusi, Jakarta, 2017

Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, “Penataan Kekuasaan Kehakiman”, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2019)

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, (Surabaya: Universitas Airlangga, tanpa tahun)

Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998)

Suparman Marzuki, “Mencermati Birokrasi, Prosedur, dan Aparat Administratur Peradilan Indonesia”, Makalah, Jakarta, 2017

Hasil Penelitian:

Ahmad, “Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial: Independensi Hakim Bukan Sebagai Hak Melainkan Kewajiban”, Prosiding, Tangerang: Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Excellent Court, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2017

Suwoto Mulyosudarmo, “Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan”, Disertasi, Surabaya: Universitas Airlangga, 1990

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Hakim

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat

Bagian Pembukaan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

Penjelasan Umum Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim

Website/Internet:

Anggota Komisi Yudisial, “Terlibat Narkoba, Hakim DA Terbukti Melanggar Etik dan Diberhentikan Tidak dengan Hormat”, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15408/terlibat-narkotika-hakim-da-terbukti-melanggar-etik-dan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat, diakses pada 23 November 2023

Antikorupsi.org, “Tren Vonis Kasus Korupsi 2022”, <https://antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2022-0>, diakses pada 23 November 2023

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “Lembaga Negara”, <https://www.dpr.go.id/index/link>, diakses pada 5 Desember 2023

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan”, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=598:reformasi-konstitusi-perspektif-kekuasaan-kehakiman&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180&lang=en, diakses pada 21 November 2023

Khairil Anwar, “Hakim Danu Arman Dipecat Karena Pesta Sabu, Ini Perjalanan Kasusnya”, <https://banten.idntimes.com/news/banten/khairil-anwar-11/hakim-danu-arman-dipecat-karena-pesta-sabu-ini-perjalanan-kasusnya-c1c2?page=all>, diakses tanggal 28 November 2023

Miko Ginting, “Terbukti Terima Suap, Hakim DS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat”,

https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/293/terbukti-terima-suap-hakim-ds-diberhentikan-tidak-dengan-hormat , diakses pada 23 November 2023

Rangga Eka Sakti, “Survei Litbang “Kompas”: Suap Masih Bayangi Kinerja Penegakan Hukum”, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/05/24/survei-litbang-kompas-suap-masih-bayangi-kinerja-penegakan-hukum>, diakses tanggal 18 November 2023

Rasyid Ridho, “Hakim PN Rangkasbitung “Nyabu” Ternyata Tak Ditahan, Tapi Direhabilitasi di Lido”, <https://regional.kompas.com/read/2022/10/19/165331578/hakim-pn-rangkasbitung-nyabu-ternyata-tak-ditahan-tapi-direhabilitasi-di>, diakses pada 5 Desember 2023

Riki Perdana Raya Waruwu, “Bayang-bayang Majelis Kehormatan Hakim”, <https://www.ikahi.or.id/artikel/bayang-bayang-majelis-kehormatan-hakim-mkh->, diakses pada 23 November 2023

Salsabila Syahira, “Kekuasaan Yudikatif Pengertian, Tujuan, Aspek, Tugas dan Contohnya”, <https://umsu.ac.id/berita/kekuasaan-yudikatif-pengertian-tujuan-aspek-tugas-dan-contohnya/#:~:text=Yudikatif%20bekerja%20secara%20independen%20dan,kepada%20mereka%20yang%20melanggar%20hukum>, diakses tanggal 5 Desember 2023

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Dr. M. Taufiq HZ, M.HI, Wakil Ketua Komisil Yudisial Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, Tanggal 6 Desember 2023, Pukul 09:00 WIB

Hasil wawancara dengan Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Pidana, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Tanggal 6 Desember 2023, Pukul 13:30 WIB